

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
DI KOTA MALANG DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

**⋮
SKRIPSI**



**Disusun oleh :
RUBEN GHERU KAKA
2015110213**

**FAKULTAS : EKONOMI
PRODI : AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBUANA TUNGGADDEWI
MALANG
2019**

RINGKASAN

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD DI KOTA MALANG

Ruben Gheru Kaka

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang Jawa Timur

Telp: 082141236221

Email: yohanabella09@gmail.com

Tujuan dari riset berikut ialah untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2016–2018 ditinjau dari rasio keuangan. JL. Mayor Jend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132, merupakan alamat dimana penelitian ini dilakukan. Sedangkan data keuangan APBD Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tahun anggaran 2016–2018 digunakan pada riset berikut.

Wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di wilayah kota Malang dijadikan sebagai metode pengumpulan data. Sejumlah ukuran keuangan, termasuk rasio independensi, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pengelolaan pengeluaran, dan analisis pertumbuhan, digunakan dalam perbandingan deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa wilayah metropolitan Malang dapat menunjang operasional pemerintahannya sendiri berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio efikasi menunjukkan realisasi penerimaan PAD telah melampaui jumlah yang dialokasikan. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa meskipun analisis pertumbuhan meningkat setiap tahunnya, pelaksanaan pembangunan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kata Kunci : Kinerja APBD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Analisis Pertumbuhan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No. 32 tahun 2004 terkait PERDA, untuk melaksanakan otonomi daerah, daerah harus diberikan wewenang seluasnya, real, dan akuntabilitas secara proporsional. Kewenangan ini harus diberikan untuk planning, melaksanakan, mengawasi, pengendalian, dan mengevaluasi pada segala hal; Namun, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus digunakan saat memberikan kewenangan kepada pemerintah di bidang seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama.

Dengan otonomi yang luas, daerah diperbolehkan mengendalikan dan memberikan aturan keluarganya sendiri dengan menggunakan dan mengelola sumber pendapatan serta menetapkan batasan pengeluaran yang ditetapkan dalam APBD untuk pendapatan dan pengeluaran.

Kemampuan PEMDA dalam menyediakan sumber daya keuangan yang sebanding dengan jumlah kegiatan pelayanan publik di daerahnya dipengaruhi oleh berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 terkait PEMDA yang didukung oleh UU 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya pendapatan yang dihasilkan oleh perimbangan dana dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan pemerintah daerah beroperasi lebih efisien dan efektif.

Tujuan utama UU No. 33 tahun 2004 bukan semata-mata untuk mengalihkan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke PEMDA; sebaliknya, kemandirian dan efisiensi sumber daya keuangan yang dikandungnya lebih penting. Meskipun diakui bahwa sejumlah faktor lain, baik yang berkaitan dengan SDM, organization, manajemen, sarana dan prasarana, serta variabel pendukung lainnya, juga berdampak terhadap kapasitas keuangan daerah, namun permasalahan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. komponen kunci dalam melaksanakan otonomi daerah. Keyakinan bahwa mobilisasi sumber daya keuangan daerah merupakan aspek terpenting dalam pengelolaan pemerintahan daerah menjelaskan pentingnya variabel keuangan daerah. Bentuk penilaian kinerja berupa rasio keuangan. Berbagai rasio keuangan, Akuntabilitas pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan metrik seperti rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio keselarasan, rasio pertumbuhan (analisis pergeseran), dan rasio proporsi pendapatan dan belanja (analisis persentase). (Halim, 2002: 128).

Sejauh mana instrumen atau kerangka administrasi moneter teritorial yang ada dapat memberikan nuansa administrasi moneter yang adil, masuk akal, lugas, partisipatif dan mumpuni harus diimbangi dengan pelaksanaan kemandirian daerah. Hal ini tidak bergantung pada berapa banyak aset yang akan dialokasikan. seragam untuk setiap lokal.

Memberikan independensi dan desentralisasi yang luas sejalan dengan kapasitas otoritas publik untuk mengawasi rencana belanja daerah dengan penekanan pada kepentingan publik. Kemampuan negara daerah dalam mendukung kemajuan, penyelenggaraan pemerintahan sosial daerah, dan pelaksanaan kewajiban pemerintah secara implisit tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 105 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengelolaan moneter teritorial. Hal ini harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan materi peraturan dan pedoman, secara efisien, nyata, lugas, dan dapat diandalkan, dengan mengutamakan kepatutan dan konsistensi terhadap kapasitas kewilayahan dalam mengawasi dana yang dituangkan dalam APBD daerah dan daerah. Kecenderungan pemerintah daerah dalam menjalankan kemandirian provinsi akan sangat dipengaruhi oleh evaluasi administrasi teritorial dan moneter.

Estimasi pelaksanaan sangat penting untuk menilai tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengawasi dana daerah, terutama mengingat adanya independensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kelayakan pengawasan aset keuangan daerah dalam rangka pengembangan lebih lanjut bantuan dan administrasi pemerintah di daerah. . Bertanggung jawab mencakup sesuatu selain kemampuan untuk menunjukkan bagaimana aset publik digunakan; Hal ini juga memerlukan kemampuan untuk menunjukkan bahwa aset telah dimanfaatkan dengan sukses, efektif, dan efisien.

Dengan menggunakan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah diciptakan pada era otonomi daerah. Sistem anggaran yang memprioritaskan upaya untuk mendapatkan hasil atau keluaran kinerja dari alokasi pengeluaran terjadwal atau masukan yang ditentukan dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja.

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam pengukuran kinerja sektor publik:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah merupakan tujuan utama penilaian kinerja sektor publik.
2. Alokasi sumber daya dilakukan melalui penggunaan metrik kinerja sektor publik.
3. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk memberikan peningkatan komunikasi kelembagaan dan menunjukkan tanggung jawab publik.

Sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang, maka penulis tertarik melaksanakan riset yang berjudul “**Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kota Malang Dalam Era Otonomi Daerah''.

B. Rumusan Masalah

Dilatar Belakang pemaparan diatas, ada beberapa perumusan permasalahan dibawah ini:

1. Bagaimana kinerja keuangan PEMKOT Malang dalam era otonomi daerah?
2. Bagaimana Pertumbuhan APBD PEMKOT Malang dalam era otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Riset berikut bertujuan untuk:

1. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan PEMKOT Malang dalam era otonomi daerah.
2. Untuk Menganalisis Pertumbuhan APBD PEMKOT Malang dalam era otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapannya riset berikut bisa memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah Kota Malang

Harapannya dari hasil riset berikut bisa digunakan untuk menjadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan APBD.

2. Bagi Akademis.

Temuan riset berikut harapannya bisa berkontribusi pada mengembangkan dan penerapan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan analisis APBD serta memberikan gambaran analisa rasio APBD.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diyakini dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat umum dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.

4. Bagi Peneliti

memberikan informasi dan pemahaman kepada para akademisi, khususnya mengenai pembiayaan daerah dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, 2008. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, Edisi Kedua. Medan: USU Press
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat . 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- M Mamduh dan Abdul Halim. 2009. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Jhingan, M.L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Persada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah:
- Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2012. Jakarta:
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
- Penerbit Andi. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
- BPFE . 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta:
- BPFE Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Bandung :
- Refika Aditama Moleong, Lexy J., 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nirzawan. 2001, Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara - Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :
- UPP YKPN Ruslan, Rosady. 2008. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta:
- Rajawali Pers Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta:
- Ghalia Indonesia Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:
- Alfabeta Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
- Lukman Offset YPAPI Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik - Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.